**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Literature Review**

*Literature review* merupakan sebuah tulisan ilmiah yang mencakup pengetahuan saat ini termasuk pengetahuan saat ini termasuk temuan substansif, serta kontribusi teoritis dan metodologis untuk topik tertentu. Tinjauan literatur adalah sumber sekunder dan tidak melaporkan kajian eksperimental baru atau asli. Selalu dikaitkan dengan kajian akademik seperti tesis. Ulasan semacam itu ditemukan dalam jurnal akademik. Membuat tinjauan pustaka juga dapat menjadi bagian dari pekerjaan mahasiswa sarjana dan pascasarjana dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, atau artikel junal. Tinjauan literatur juga umum dalam proposal penelitian atau prospectus (dokumen yang disetujui sebelum seorang siswa secara formal memulai tugas akhir).[[1]](#footnote-2)

* + 1. **Zaenal Arifin, Pengaruh Invasi Militer Amerika Serikat Terhadap Proses Demokrasi di Afghanistan, 2008, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta**

Dalam skripsi yang ditulis oleh Zaenal Arifin, membahas tentang bagaimana Presiden George ingin mengubah sistem pemerintahan di Afghanistan. Presiden George W. Bush memang mengharapkan bahwa invasi militer di Afghanistan akan menjadi *exit strategy* yang paling tepat dan efektif dalam rangka perang melawan terorisme. Namun, setelah melakukan invasi militer, Amerika Serikat menemukan kenyataan bahwa membangun sebuah negara Afghanistan yang demokratis (bahkan hanya secara politik) yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi sangat sulit, bahkan dalam jangka pendek mendekati kemustahilan. Padahal Amerika Serikat praktis sudah melakukan intervensi di hampir semua komponen kehidupan Afghanistan dalam kerangka mewujudkan negara demokratis agar tidak lagi menjadi ancaman bagi negaranya. Hal ini di karenakan situasi dan kondisi kehidupan di Afghanistan, terutama dalam hal keamanan, masih diwarnai persaingan antar kelompok, ambisi pribadi para panglima perang, perebutan kuasa lokal, dan perpecahan etnis serta agama di antara rakyat Afghanistan sendiri.

Walaupun AS telah sudah memulai perang melawan terorisme, Afghanistan masih menghadapi banyak masalah. Di antara masalah-masalah berikut, beberapa yang paling serius adalah: pertama, Taliban dan al-Qaeda belum terkalahkan. Mereka hanya terpecah belah dan mencari kesempatan untuk membalas tindakan Amerika Serikat. Kedua, pemerintah transisional Afghanistan terlalu penuhkan diri pada segala hal, baik ekonomi, politik, maupun militer, sehingga sulit untuk mendapat kepercayaan dari rakyat Afghanistan. Jika kedua masalah besar ini tidak bisa diselesaikan, keamanan dan stabilitas di Afghanistan tidak dapat dijamin.

Selain itu, sistem kemasyarakatan Afghanistan yang telah terintegrasi dengan kuat dalam diri rakyat Afghanistan dan adanya kekuatan militer dari kelompok-kelompok (milisi) lokal, sangat sulit juga untuk mengharapkan sistem pemerintahan Afghanistan untuk mewujudkan negara dengan sistem demokrasi ala barat. Demokratisasi di Afghanistan dilakukan dalam berbagai tingkatan seperti, liberalisasi yang dilakukan saat Amerika Serikat melakukan invasi militer ke Afghanistan, yang ditujukan untuk pelepasan rakyat Afghanistan yang terkekang selama masa pemerintahan Taliban, menuju rakyat demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan, hak sipil, dan hak politik. Selanjutnya dalam tahap transisi, Amerika Serikat memiliki peran besar di mana sebagian besar konvensi dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan merupakan dorongan dan didanai oleh Amerika Serikat. Sementara dalam instalasi pemerintahan, Amerika Serikat berhasil dalam hal mendukung pembentukan rezim baru dalam pemilihan umum, namun dapat dikatakan gagal karena hasil pemilihan umum tidak kuat. Kegagalan pemerintah pusat Afghanistan yang didukung Amerika Serikat tidak memungkinkan Afghanistan melangkah lebih jauh menuju konsolidasi demokrasi. Dengan demikian, peran Amerika Serikat dalam demokratisasi di Afghanistan bisa dikatakan hanya berhasil pada tahap pengenalan demokrasi kepada rakyat Afghanistan.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tujuan Amerika pada awalnya membantu kaum Mujahidin untuk melawan Uni Soviet, yang pada akhirnya Uni Soviet keluar dari Afghanistan. Setelah Uni Soviet keluar, perang di Afghanistan tidak reda, malah semakin memburuk karena adanya tragedi 9/11. Tragedi tersebut membuat Amerika membuka suara untuk perang melawan teroris. Dalam perang yang dicanangkan oleh Amerika, di saat itu pula Amerika melihat peluang untuk mengubah pemerintahan yang telah berkuasa selama ini di Afghanistan yang di pimpin oleh kaum Taliban, yang dianggap meresahkan rakyat. Amerika ingin mengubah sistem pemerintahan di Afghanistan dengan sistem demokrasi. Pada akhirnya kaum Taliban keluar dari Afghanistan, dan pada tahun 2004 terjadi pemilihan umum untuk pertama kalinya di Afghanistan, dengan sistem pemerintahan yang demokratik.

* + 1. **Z. A. Maulani, Perang Afghanistan: Perang Menegakkan hegemoni Amerika di Asia Tengah, Dalancang Seta, 2002, Jakarta.**

Pada tanggal 11 September 2001, terjadi penyerangan dadakn di bagian timur Amerika. Gedung kembar WTC dan Pentagon telah hancur. Badan-badan keamanan Amerika, tanpa bukti-bukti konkret menuduh Osama bin Laden, multi-milyader asal Saudi Arabia terlibat dengan serangan itu. Presiden George W. Bush bersumpah untuk menghabisi terorisme sampai ke akar-akarnya dan menghukum negara mana saja yang memberikan penampungan, perlindungan, dan dukungan kepada organisasi dan kegiatan terorisme dimana saja mereka berada.

Sebagai tokoh tertuduh utama, Amerika mengirim pasuka militer ke Afghanistan untuk menangkap Osama. Amerika melakukan pemboman secara ekstensif dan massif, baik dengan peluru kendali maupun bom curah, dan semua sistem senjata teknologi tinggi yang sasarannya tidak pilih bulu.

Akhirnya, aksi militer Amerika Serikat di Afghanistan bukan hanya untuk menangkap Osama Bin Laden yang diduga sebagai pelaku dari serangan gedung WTC tanggal 11 September 2001 tetapi dengan alasan pemerintah Taliban yang tidak mau berkerjasama untuk menyerahakan Osama Bin Laden. Di balik itu semua, ternyata Amerika Serikat juga sebenarnya juga ingin menjatuhkan pemerintahan Taliban yang otoriter dan di anggap mengganggu kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah dan menggantikan dengan pemerintahan yang demokrasi yang mendukung Amerika Serikat.

Serangan 11 September 2001 di gedung WTC telah memberikan kesempatan bagi Amerika Serikat untuk menaikkan anggaran militernya untuk dapat membuat persenjataan yang canggih dan mengujinya pada perang melawan Afghanistan. Amerika Serikat memiliki motivasi untuk menjatuhkan pemerintan Taliban karena Amerika Serikat tidak ingin adanya pemerintahan Islam bergaris keras di Timur Tengah karena akan mengganggu Amerika Serikat dalam mencapai kepentingannya di Timur Tengah.

Dalam penelitian ini, penulis membahas pasca tragedi 9/11, Afghanistan menjadi negara yang dianggap sebagai sarangnya teroris oleh Amerika, karena berdirinya jaringan islam Radikal Al- Qaeda dan Taliban yang dituding bersekongkol. Awalnya, Amerika menyuruh Taliban untuk membawa Al-Qaeda dan pemimpinnya Osama kehadapan Amerika, tetapi Taliban tidak memenuhi tugas tersebut. Akhirnya Taliban dituding sebagai kaum teroris. Saat itu, Amerika langsung menyerang kota-kota di Afghanistan dengan dibantu oleh Aliansi Utara. Negara Afghanistan langsung hancur seketika, bom dimana-mana. Amerika menyerang lewat serangan udara kemudian disusul dengan serangan darat.

* + 1. **William Maley, Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan, Pustaka Al-Kautsar, 1999, Jakarta.**

Tanggal 26-27 September 1996 Kabul dikepung kekutan bersenjata yang menyebut dirinya sebagai “Taliban”, yang berarti penuntut ilmu. Hanya dalam hitungan hari, para pemimpin Taliban menerapkan aturan baru yang meruntuhkan aktivitas kota Kabul secara paksa. Salah satunya kaum wanita yang beberapa dekasde leluasa melakukan aktivitas sosialnya dan mendominasi Universitas Kabul, tiba-tiba dilarang, kecuali memakai *burqa* (pakaian yang menutup muka dan seluruh badan). Sedangkan, kaum laki-laki diharuskan memanjangkan jenggot. Apabila melanggar, hukumannya jelas menanti. Mereka juga melarang music, kaset tape, main laying-layang, memelihara merpati dirumah, dan main catur. Bahkan tak jarang penangkapan dilakukan dari rumah ke rumah, yang membuat geram organisasi Amnesti Internasional.

Afghanistan adalah sebuah negeri di Asia Tengah, yang kurang lebih penduduknya berjumlah 15 sampai 20 juta jiwa. Mayoritas penduduknya adalah Islam Sunni dengan sekitar 10 sampai 20 persen penganut Syi’ah. Terdiri dari beberapa jenis etnis dan Bahasa, dengan Bahasa Persia dan Pustun sebagai Bahasa utama. Secara ekonomi aaupun daerah hunian Afghanistan terbagi dalam perbedaan yang kontras.sebagaian besar rakyat Afghanistan hidup di pedesaan dengan bertani atau bertenak. Karakter masyarakat Afghanistan akan menjelaskan watak mereka yang teguh pendirian, tabah sehingga membuat mereka bisa melakukan perlawanan dan hidup dalam kondisi sesulit apapun.

Image banyak orang tentang Afghanistan, kebanyakan terwarnai oleh romantisme masa silam. Pengalaman Inggris saat perang Anglo-Afghan I pada tahun 1838-1842, serta memoir Sir Frederick Robert saat mengadakan perjalanan ke Kandahar pada Perang Anglo-Afghan II pada tahun 1878-1879, umumnya bercerita tentang kebuasan, pasukan bersenjata dan orang gondorng dari kabilah-kabilah yang berusaha menendang mundur pasukan modern. Ciri-ciri yang kemudian digambarkan sebagai perilaku Taliban. Padahal Afghanistan mempunyai realitas yang lebih kompleks dari sekedar yang disebutkan diatas.

Dalam penelitian ini, penulis membahas konflik yang terjadi di Afghanistan, berawal dari konflik internal yang kemudian menjadi konflik eksternal. Konflik di Afghanistan sudah bertahun-tahun lamanya. Konflik yang terjadi di Afghanistan adalah konflik sektarian atau agama. Awalnya konflik yang terjadi karena kudeta yang disebabkan tidak sukanya dengan pemerintahan yang dipimpin oleh kaum tersebut. Perdebatan antara kaum yang menganut Islam Moderat dan Islam Radikal ini membuat konflik yang terjadi berkepanjangan hingga terjadinya konflik ideologi seperti sekarang. Pertempuran antara rezim otoriter dan rezim demokrasi yang ingin menguasai negara Afghanistan.

1. **Kerangka Teoritis**

Kerangka teori berisi uraian tentang telahaan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaahan ini bisa dalam arti membandingkan, mengkontraskan atau meletakan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya. Dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil-hasil penelitian ilmiah para pakar terdahulu dalam satu adegan verbal sehingga pembaca “diberitahu” mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti. Hal ini juga dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk dalam merumuskan asumsi-asumsi dalam penelitiannya.[[2]](#footnote-3)

Hubungan Internasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya membentuk tiga pola, yaitu kerjasama *(cooperation)*, persaingan *(competition)*, dan konflik *(conflict)* antar negara yang satu dan yang lainnya. Maka dari itu, Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antar negara-negara yang berdaulat di dunia, terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehinga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara menutup diri terhadap dunia luar.

Untuk mengatasi konflik internal maupun konflik eksternal, dibutuhkan suatu kerjasama internasional, suatu negara yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain di era globalisasi sekarang ini. Sehingga dibutuhkan kerjasama internasional negara-negara yang memiliki kepentingan tersebut. Maka dari itu, pengertian Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional dan penggunaan politik dalam pencapaian kepentingan suatu negara, seperti yang dijabarkan oleh **Ahmad Dahlan Nasution**, sebagai berikut:

**Secara analitik, hubungan internasional itu menunjukkan dua teori, yaitu tindakan yang berurusan dengan sebuah negara dalam tindakan-tindakannya, dan teori interaksi yang memperlihatkan hubungan antar bangsa. Teori tindakan merupakan politik luar negeri, sedangkan teori interaksi merupakan kajian dari politik internasional.**[[3]](#footnote-4)

Definisi Hubungan Internasional menurut **Mc. Clelleand** adalah sebagai berikut:

**Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan tertentu termasuk studi tentang keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi.**[[4]](#footnote-5)

Selanjutnya **KJ Holsti** lebih memperjelaskan istilah hubungan internasional sebagai berikut:

**Istilah Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian Hubungan Internasional, termasuk di dalamnya perngkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata, transportasi komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.**[[5]](#footnote-6)

Dalam pemahaman interaksi internasional, maka studi mengenai politik internasional menjadi pemikiran utama yang tidak lepas dari pembahasan. Karena teori interaksi merupakan kajian dari politik internasional yang artinya hubungan antar Negara dimana setiap komponen memiliki aspek seperti *Power* atau Kekuatan serta tujuan-tujuan yang diinginkan. Politik internasional pada dasarnya meliputi bagian kekuasaan dalam konteks internasional, *Balance of Power* atau Keseimbangan Kekuatan antara aktor-aktor negara, hubungan antar bangsa yang didasarkan pada ekonomi, perdagangan, aliansi, dan juga konflik yang bersifat bilateral, regional, maupun secara global yang menyangkut kepada lembaga dengan substansi kerjasama internasional. Beberapa orang menganggap bahwa perimbangan kekuasaan itu kurang lebih berjalan secara otomatis untuk menunjukkan stabilitas hubungan antarnegara, yang bisa dianggap sebagai teori umum.

Pola perilaku yang kita sebut sebagai politik internasional merupakan produk dari sejumlah factor yang berinteraksi secara kompleks. Menurut **William D. Coplin** dalam bukunya Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*,* menjelaskan:

**Politik Internasional menyangkut seluruh dunia, bukan sekedar hubungan antarnegara, melainkan juga menyangkut kondisi-kondisi yang muncul di dalam negara yang mempengaruhi hubungan diantara negara-negara konsekuensinya.**[[6]](#footnote-7)

Politik internasional dapat dikatakan seperti kepanjangan dari politik luar negeri suatu negara, karena mengandung unsur tujuan-tujuan nasional suatu bangsa diluar wilayahnya. Hal ini seperti yang di gambaran yang dikatakan oleh **Mochtar Kusumaatmadja,** sebagai berikut:

**Politik Internasional pada hakekatnya alat suatu untuk mencapai suatu kepetingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh karena itu, politik luar ngeri merupakan suatu aspek dari strategi nasional beserta sasaran jangka pendek dan jangka panjang.**[[7]](#footnote-8)

Dalam konsep kedaulatan sutau negara, dikatakan bahwa negara adalah berdaulat, sehingga suatu negara memiliki kedaulatan untuk menentukan sendiri bagaimana negara itu membuat suatu kebijakan baik dalam maupun luar negeri tanpa adanya campur tangan dari negara lain, sehingga merupakan manifestasi utama hubungan negara dengan negara lain. Seperti yang dikatan oleh **P. Anthonius Sitepu,** dalam bukunya Studi Hubungan Internasional, yaitu:

**Politik Luar Negeri adalah keseluruhan perjalanan keputusan pemerintah untuk mengatur semua hubungan dengan negara lain. Politik Luar Negeri merupakan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan negara lain. Politik Luar Negeri juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kebijaknsanaan atau tindakan yang diambil dalam hubungannya dengan situasi/aktor yang ada di luar batas-batas wilayah negara. Politik Luar Negeri merupakan manifestasi utama dari perilaku negara dalam hubungannya dengan negara lain, sehingga yang terjadi adalah adanya interaksi negara-negara.**[[8]](#footnote-9)

Politik Luar Negeri suatu negara selalu memiliki kebijakan-kebijakan di dalamnya. Kebijakan-kebijakan itu dibuat untuk negara itu sendiri, dibuat sendiri, dan tanpa campur tangan dari negara lain. Kebijakan itu diperlukan untuk melindungi rakyatnya baik ancaman dari dalam atau luar negeri. Kebijakan tersebut disebut dengan Kebijakan Luar Negeri. Seperti yang dikemukakan oleh **K.J Holsti** seperti berikut:

**Kebijakan Luar Negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu alam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain.**[[9]](#footnote-10)

**Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat** tak lepas dari kepentingan nasionalnya yaitu untuk melindungi warga negara, teritorial, mata pencaharian, dan melindungi negara sekutu. Politik luar negeri Amerika Serikat selalu sejalan dengan kepentingan nasional yang ingin dicapainya. Politik luar negeri Amerika mengalami dinamika perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi domestik maupun internasional. Politik Luar Negeri Amerika Serikat dinamis menyesuaikan kepentingan nasional dan konteks internasional yang sedang dihadapi. Setiap periode kepemimpinan menetapkan prioritas tertentu terkait Politik Luar Negeri Amerika Serikat yang menunjukan adanya perubahan yang menarik.

Dalam setiap politik luar negeri suatu negara selalu di rancang untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan Nasional *(National Interest)* adalah tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Konsep ini cukup efektif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku internasional, dan perilaku suatu negara. Maka dalam buku Pengantar Hubungan Internasional yang ditulis oleh **Theodore A. Colombus,** mengartikan Kepentingan Nasional sebagai berikut:

**Kepentingan Nasional bisa di definisikan lewat proses-proses demokrasi, proses tersebut menyangkut perdebatan terbuka dan continue, serta pernyataan mengenai berbagai persepsi yang berkaitan kepentingan kolektif. Keputusan yang biasanya merupakan sintesis dari kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan yang dibentuk oleh mayoritas rakyat melalui wakil-wakilnya dan bersamaan dengan itu hak-hak dan kepentingan minoritas.**[[10]](#footnote-11)

**Kepentingan Nasional** ini menjadi landasan bagi perumusan Kebijakan Luar Negeri. **Amerika Serikat**, sebagai sebuah negara, tentunya memiiki Kepentingan Nasional, diantaranya[[11]](#footnote-12):

**Pertama, mencegah serangan teroris ke wilayah Amerika Serikat.**

Washington berupaya mencegah serangan, baik serangan nuklir maupun serangan militer, ke wilayahnya. Untuk mengatasi ancaman serangan tersebut, Washington dapat melakukan beberapa langkah. misalnya melalui *Cooperative Security* yang melibatkan berbagai negara ataupun mengisolasi negara yang dianggap sebagai ancaman.

**Kedua, menyebarkan demokrasi dan mempertahankan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh dunia.**

Mengapa Amerika Serikat "wajib" menyebarkan demokrasi dan HAM bahkan mempropagandakan bahwa dua hal tersebut merupakan sistem terbaik di dunia? Menurut salah seorang ahli sekaligus peneliti Hubungan Internasional, demokrasi dan HAM menjadi alat bagi Washington untuk melemahkan power negara lain. Singkatnya, semakin demokratis suatu negara maka power negara akan semakin lemah. Karena HAM menjadi pilar bagi berlangsungnya demokrasi, Washington perlu mempertahankan HAM. Salah satu hambatan bagi penyebaran demokrasi adalah adanya keraguan bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan seiring. Artinya, negara berpenduduk mayoritas pemeluk Islam hanya mempunyai satu pilihan ideologi: Islam atau demokrasi.

Para penganut kaum Realis, **Morgenthau** menyamakan Kepentingan Nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power,* dimana *power* atau kekuasaan adalah:

**Segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara control suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu, kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam Politik Internasional.**[[12]](#footnote-13)

Studi strategi pada dasarnya adalah mempelajari bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup *(how to survive)* menyangkut isu-isu keamanan nasional, regional, dan internasional. Jadi bukan masalah pertahanan atau strategi dalam pertempiran saja. Namun strategi pertahanan dan keamanan merupakan suatu tindakan keseluruhan yang dilakukan untuk menghadapi setiap ancaman yang motifnya datang dari dalam maupun luar negeri yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara bahkan strategi sendiri merupakan suatu kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung tetap di dalam atau kembali kepada suatu keadaan yang harmonis, stabilitas sama dengan tidak adanya perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau ditentukan[[13]](#footnote-14)

Adapun pengertian strategi yang dikemukakan oleh **Jack C. Plano dkk,** dalam bukunya Kamus Analisa Politik menyatakan bahwa:

**Strategi adalah suatu ancang-ancang untuk mengalahkan lawan atau mencapai tujuan lain. Strategi biasanya mencakup serangkaian gerakan yang langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh. Sebaliknya taktik terdiri dari gerakan tungal atau serangkaian langkah terbatas kearah tujuan antara *(intermediate)* di dalam perencanaan yang lebih luas.**[[14]](#footnote-15)

Banyaknya perspektif tak jarang menimbulkan perdebatan, namun hal tersebut demi diperolehnya pendekatan yang paling relevan. Salah satu perspektif yang paling klasik, sederhana, dan mudah dimengerti adalah realisme. Dalam perkembangannya, realisme menjadi salah satu perspektif terbesar dalam studi Hubungan Internasional. Perspektif Realisme muncul sebagai reaksi keras terhadap kegagalan perspektif Liberalisme/Idealisme dalam mencegah agresivitas negara tertentu yang menandai pecahnya Perang Dunia Kedua.

Inti dari serangan kaum Realis adalah bahwa analisis kaum Liberalis/Idealis terhadap fenomena politik internasional yang mendasarkan pada asumsi bahwa negara seperti layaknya individu memiliki kecenderungan baik dan saling bergantung satu sama lain merupakan sebuah kekeliruan. Sebaliknya, kaum Realis berpendapat bahwa hakikat manusia dan negara pada dasarnya agresif dan egodentrik sehingga politik internasional adalah arena perjuangan untuk memperoleh kekuasaan. Dalam situasi anarki (ketiadaan pemimpin dunia), maka masing-masing negara harus memperjuankan kelangsungan hidupnya melalui pembangunan kekuatan militer. Para kaum Realis beranggapan *power* merupakan salah satu factor yang dominan dalam suatu interaksi, dan perdamaian internasional dapat dicapai dengan perimbangan kekuasaan. Seperti yang dikatakan oleh **Morgenthau** tentang pendekatan realisme:

**Untuk menjamin agar tidak ada negara-negara berkekuatan besar *(great power)* berhasil mencapai posisi hegemoni atas dominasi keseluruhan, berdasarkan intimidasi, paksaan, atau penggunaan kekuatan yang sewenag-wenang, adalah penting bagi suatu negara untuk membangun dan memelihara keseimbangan kekuatan militer. Keamanan nyata-nyata merupakan salah satu nilai paling fundamental dalam hubungan internasional.**[[15]](#footnote-16)

Teori diatas memberikan dasar bahwa negara tidak akan lepas dari aspek keamanan dan juga konflik. Membangun stabilitas dan keseimbangan keamanan negara merupakan nilai yang sangat penting untuk berinteraksi dan dan mencapai tujuan suatu negara. Konflik merupakan hal-hal yang tidak mudah terhindarkan dalam interaksi hubungan internasional, masalahnya adalah bagaimana menempuh langkah-langkah untuk membina upaya bersama guna mengurangi serta menghindari konflik yang berkepanjangan. Sumber konflik bisa terletak pada kelangkaan sumber daya-daya serta egosentrisme masing-masing negara atau kesatuan social tertentu, yaitu aspirasi untuk meningkatkan kekuatan serta kedudukan dalam hhubungan dngan negara-negara lain atau kesatuan social lainnya.[[16]](#footnote-17)

**Robert M.Z Lawang,** mengemukakanpengertian konflik adalah:

**Konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, tatus, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukan pesaingnya. Konflik juga dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang relative terbatas.**[[17]](#footnote-18)

Dalam bukunya yang berjudul *The Twenty Years Crisis (1939)*, **E.H Carr** mengemukakan tentang konflik antar negara, yaitu:

**Konflik antar negara tidak bisa dihindari dalam sistem internasional tanpa otoritas yang berwenang yang mengatur hubungan diantara mereka. Setiap individu harus tunduk pada ketentuan hukum dalam negara. Namun hal tersebut tidak berlaku peraturan yang dapat memaksakan ketundukan negara. Tidak ada hukum internasional yang bisa membuat negara mempertimbangkan tindakan-tindakannya. Negara dapat dengan bebas melakukan apa saja dengan kekuatan yang mereka miliki.**[[18]](#footnote-19)

Konflik yang terjadi di Afghanistan disebabkan karena adanya konflik sektarian atau agama dan ideologi. Menurut **Rizal Panggabean**, salah satu staf pengajar Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, di Universitas Gajah Mada, konflik sektarian yaitu:

**Konflik yang melibatkan sekte dan aliran keagamaan berbeda di dalam tubuh satu agama.**[[19]](#footnote-20)

Sedangkan ideologi, seperti yang dikatakan oleh **Nicollo Machiavelli**, adalah sebagai berikut:

**Ideologi adalah pengetahuan mengenai cara menyembunyikan kepentingan, mendapatkan, serta mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan konsepsi-konsepsi keagamaan dan tipu daya.**[[20]](#footnote-21)

**Resolusi konflik** adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.[[21]](#footnote-22)

Konflik dapat dilatar belakangi oleh banyak hal. Konflik internal maupun eksternal suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal, baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Tentulah kedua belah pihak maupun pihak luar yang menyaksikan menginginkan konflik dapat diakhiri. Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional.

Menurut **Johan Galtung** ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu:[[22]](#footnote-23)

1. ***Peacekeeping***

Proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

1. ***Peacemaking***

Proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan stategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama pada level elit atau pimpinan. Dikaitkan dengan kasus ini pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penegah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.

1. ***Peacebuilding***

Proses implementasi perubahan atau rekonstruksi social, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding diharapkan negative peace *(the absence of violence)* berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan social, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Proses penyelesaian konflik di Afghanistan menggunakan teknik *Peacemaking.* Pemerintah Afghanistan melakukan proses perundingan dengan adanya rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik di Afghanistan. Diperlukan adanya mediasi untuk menengahi jalannya proses penyelesaian konflik di Afghanistan.

Secara garis besar, gerakan adalah sekelompok atau suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai target tertentu, berusaha bergerak serta berupaya untuk mencapainya. Dengan demikian, sebuah kelompok dapat disebut gerakan apabila mempunyai landasan tertentu, mempunyai tujuan atau target yang telah ditetapkan, dan mempunyai metode untuk meraih target.[[23]](#footnote-24) Terdapat empat gerakan dalam islam, yaitu Islam Moderat, Islam Radikal, Islam Fundamental, dan Islam Liberal.

1. **Islam Moderat**, Islam yang mampu berdialektika dengan lingkungan dan teguh dalam berideologi. Bagi Islam Moderat, hal ini memang tidak mudah. Butuh banyak perangkat untuk menjadikan hidup beragama secara moderat. Beragama secara moderat tidak kemudia membuat orang tidak konsisten. Disatu sisi memegang teguh dasar teologi, tapi di sisi lain harus menyesuaikan dengan situasi lingkungan. Padahal seringkali lingkungan itu bertolak belakang dengan teologi-normatif. Maka menurut Islam Moderat di situlah indahnya orang beragama yang harus dimaknai secara luas, kalau tidak dipahami secara luas, maka agama akan bergeser menjadi alat untuk menjustifikasi kesalahan-kesalahan orang lain.[[24]](#footnote-25)
2. **Islam Liberal,** dapat dikatakan sebagai Islam yang Liberal atau bebas. Gerakan Islam Liberal bertujuan untuk memberbaskan umat Islam dari belenggu keterbelakangan. Islam Liberal tidak setuju dengan pemberlakuan *syariat* secara formal oleh negara, memperjuangkan sekularisasi, emansipasi wanita, menyamakan agama Islam dengan agama yang lain *(pluralism teologi),* memperjuangkan demokrasi barat dan lain-lain. Islam Liberal hasir untuk menyampaikan pesah wajah Islam yang lain, yaitu Islam yang *non-ortodoks,* Islam yang berorientasi ke masa depan bukan ke masa silam dan mendewakan modernitas, sehingga Islam harus disesuaikan dengan kemodernitas, yang harus disesuaikan dengan kemodernan. Jika terjadi konflik antara ajaran Islam dan pencapaian modernitas, yang harus dilakukan bukanlah menolak, melainkan menafsirkan kembali ajaran tersebut. Disinilah inti dari sikap dan doktrin Islam Liberal.[[25]](#footnote-26)
3. **Islam Fundamental,** suatu gerakan yang bertujuan untuk kembali pada pandangan hidup dan praktek-praktek dasar ortodoksi agama Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah, yang menjadi ciri khas Islam pada permulaan sejarahnya. Fundamentaslisme Islam muncul karena ketidakpuasan terhadap masyarakat dunia (khususnya umat Islam) yang kian menyimpang dari ajaran dan gerakan ini tidak anti sains.[[26]](#footnote-27)
4. **Islam Radikal,** merupakan paham keislaman atau aliran dalam Islam yang menginginkan dan mencita-citakan perubahan social dan politik yang sesuai dengan *syariat* Islam yang dilakukan dengan tindakan-tindakan kekerasan dan drastis.[[27]](#footnote-28)

Berdasarkan paparan materi diatas, maka penulis mencoba membuat konklusi. Amerika Serikat melakukan invasi terhadap Afghanistan, tujuan Amerika adalah untuk menggulingkan sistem pemerintahan yang ada di Afghanistan dan terjadilah transisi demokrasi. Keterlibatan Amerika di Afghanistan serta campur tangan yang dilakukan merupakan salah satu strategi politik luar negeri Amerika Serikat untuk menjalankan kepentingannya yang berhubungan dengan agenda global Amerika Serikat yaitu ideologi, HAM, dan terorisme. Dalam menjalankan kepentingannya, Amerika melakukan aliansi dengan negara-negara diberbagai belahan dunia.

Dalam penelitian ini, berdasarkan paparan konseptual diatas, maka penulis membuat beberapa asumsi untuk mendukung dan mengarahkan kepada hipotesis, yaitu:

* + 1. Adanya gerakan teroris yang berideologikan radikal di Afghanistan membuat Amerika menjalankan misinya di negara Timur Tengah itu.
    2. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu dirancang untuk mencapai kepentingan nasional negaranya, yaitu mencegah teroris yang masuk ke negara Amerika Serikat, menyebarkan demokrasi dan mempertahankan HAM di seluruh dunia.
    3. Suatu kawasan dikatakan aman apabila stabilitas politik keamanannya tidak terganggu dari hanya atau suatu ancaman baik dari dalam maupun dari luar serta aktor negara maupun non-negara sehingga stabilitas politik dan keamanannya terjamin.

1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka teoritis, perumusan masalah, dan uraian lainnya diatas, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut: **“Jika keterlibatan serta campur tangan konflik kepentingan ekonomi-politik merupakan bagian dari orientasi serta strategi Politik Luar Negeri Amerika Serikat, maka proses mediasi melalui perundingan serta rekonsiliasi dari kelompok-kelompok yang bertikai merupakan langkah menuju perdamaian di Afghanistan.”**

1. **Operasional Variabel dan Indikator (konsep teoritik, empirik dan analisis)**

**Tabel 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| Variabel Bebas:  Keterlibatan serta campur tangan konflik kepentingan ekonomi-politik merupakan bagian dari orientasi serta strategi Politik Luar Negeri Amerika Serikat | 1. Keterlibatan Amerika Serikat. 2. Campur tangan kekuasaan. | 1. Adanya dukungan yang diberikan AS kepada kelompok Mujahidin untuk melawan Uni Soviet. (sumber data: Trias Kuncahyono, *Afghanistan*, Kompas, 4 Februari 2018) 2. Adanya campur tangan kekuasaan luar, dikomandani Amerika Serikat setelah tragedi menara kembar karena serangan teroris. (sumber data: Trias Kuncahyono, *Afghanistan*, Kompas, 4 Februari 2018) |
| Variabel Terikat:  Proses mediasi melalui perundingan serta rekonsiliasi dari kelompok-kelompok yang bertikai merupakan langkah menuju perdamaian di Afghanistan | 1. Usaha rekonsiliasi 2. Peluang membuka perundingan 3. Usaha mediasi dalam penyelesaian konflik di Afghanistan | 1. Presiden Ashraf Ghani membuka peluang untuk berusaha lagi mengajak Taliban untuk berdamai. (sumber data: Musthafa Abd Rahman, *Merangkul Taliban, Meretas Jalan Damai di Afghanistan,* Kompas, 3 Maret 2018) 2. Dalam mimbar forum Konferensi Proses Kabul II, seruan Ashraf Ghani kepada Taliban agar membuka perundingan damai merupakan kelanjutan dari upaya damai dengan Taliban sejak tahun 2015. (sumber data: Musthafa Abd Rahman, *Merangkul Taliban, Meretas Jalan Damai di Afghanistan,* Kompas, 3 Maret 2018) 3. Afghanistan melibatkan Pemerintah Indonesia untuk menjadi mediator, dan menyiapkan forum Tripartit pada Maret 2018, untuk membantu memuluskan jalannya perdamaian di Afghanistan. (sumber data: Musthafa Abd Rahman, *Merangkul Taliban, Meretas Jalan Damai di Afghanistan,* Kompas, 3 Maret 2018) |

1. **Skema Operasional Hipotesis**

**Gambar 1**

Perundingan

Negara Amerika Serikat

Keterlibatan Amerika Serikat

Negara Afghanistan

Rekonsiliasi

KONFLIK

1.Tarik Menarik Kepentingan

2.Ideologi/Transisi Demokrasi

3. HAM

4. Terorisme

Campur Tangan

1. Wikipedia, *Literature Review,* diakses dari https://en.m.wikipedia.org/wiki/Literature\_review, pada tanggal 26 Januari 2018 [↑](#footnote-ref-2)
2. Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta: 1990, hal.65 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ahmad Dahlan Nasution, *Politik Internasional: Konsep dan Teori,* C.V. Remaja Rosdakarya, Bandung: 1991, hal. 13 [↑](#footnote-ref-4)
4. Charles Mc. Clelleand, *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem,* disunting oleh Drs. H. Adil, 1981, hal. 27 [↑](#footnote-ref-5)
5. K.J Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis,* terj. Wawan Juanda, Binacipta: 1987, hal. 26 [↑](#footnote-ref-6)
6. William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis,* terj. Marsedes Marbun, disunting oleh Harry Suryana, 1992, hal. 15 [↑](#footnote-ref-7)
7. Mochtar Mas’oed, *Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi,* LP3ES, Jakarta: 1994, hal. 18 [↑](#footnote-ref-8)
8. P. Anthonius Sitepu, *Studi Hubungan Internasional,* Graha Ilmu, Yogyakarta: 2011, hal. 178 [↑](#footnote-ref-9)
9. K.J Hoslti, *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-10)
10. Theodore A. Colombus, *Pengantar Hubungan Internasional,* Putra Bardin, Jakarta: 1991, hal. 108 [↑](#footnote-ref-11)
11. Seni Berpikir, *Kepentingan Nasional Amerika Serikat,* diakses dari https://www.seniberpikir.com/rangking-kepentingan-nasional-amerika-serikat/, pada tanggal 26 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-12)
12. Banyu Perwira, *Pengntar Ilmu Hubungan Internsional,* Remaja Rosdakarya, Bandung: 2005, hal. 35 [↑](#footnote-ref-13)
13. T May Rudy, *Study Strategi: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Retika Aditama, Bandung: 2001, hal. 19 [↑](#footnote-ref-14)
14. Jack C Plano dkk, *Kamus Analisa Politik,* terj. Edi S. Siregar, Rajawali, Jakarta: 1989, hal. 253-245 [↑](#footnote-ref-15)
15. Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional,* terj. Dadan Suryadipura, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2009, hal. 5. [↑](#footnote-ref-16)
16. T. May Rudy, *Hubungan Internasional Konal Kontemporer dan Masalah-Masalah Global: Isu, Konsep, Teori dan Paradigma,* Refika Aditama, Bandung: 2003, hal. 2 [↑](#footnote-ref-17)
17. Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi,* Universitas Terbuka, Jakarta: 1994, hal. 53 [↑](#footnote-ref-18)
18. Scoot Bruchiil-Andrew Linklater. *Teori-teori Hubungan Internasional,* Nusa Media, Bandung: 2009, hal. 97-98 [↑](#footnote-ref-19)
19. MPRK UGM, *Media Massa dan Peliputan Konflik Sektarian*, diakses dari http://mprk.ugm.ac.id/media-massa-dan-peliputankonflik-sektarian/, pada tanggal 3 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-20)
20. Artikelsiana*, Pengertian Ideologi Menurut Para Ahli*, diakses dari http://www.artikelsiana.com/2014/11/pengertian-ideologi-menurut-para-ahli.html, pada tanggal 3 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-21)
21. Wordpress, *Resolusi Konflik,* diakses dari https://iwansmile.wordpress.com/teori-resolusi-konflik-2/, pada tanggal 3 Maret 2018. [↑](#footnote-ref-22)
22. Yulius Hermawan, *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi,* Graha Ilmu, Yogyakarta: 2007, hal. 93 [↑](#footnote-ref-23)
23. Muslim Mufti, *Pemikiran Politik Islam,* Pustaka Setia, Bandung: 2015, hal. 129 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ahmad Syafi’I Ma’arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah,* Mizan, Bandung: 2009, hal. 166 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-26)
26. Agus Herlambang, *Kemunculan Fundamentalis Islam: Sebuah Paradoks Globalisasi,* FISIP UNPAS, Bandung: 2009, hal. 1 [↑](#footnote-ref-27)
27. Hadi, *Akar Kemunculan Islam Radikal di Indonesia,* Gramedia, Jakarta: 2015, hal. 66 [↑](#footnote-ref-28)